



Ministry of Agriculture

Workshop on the Development of a Voluntary Global Alliance/Network for Action on Blue Growth and Food Security

September, 8-9, 2014

Hotel Borobudur

Jakarta, Indonesia

Supported by:





BLUE GROWTH & FOOD SECURITY WORKSHOP, Jakarta, September 8, 2014. Remarks by Mr. Hans Hoogeveen, Vice Minister of the Netherlands.

Workshop on the Development of a Voluntary Alliance/Network for Action on Blue Growth and Food Security

September, 8-9, 2014

Hotel Borobudur

Jakarta, Indonesia

Supported by:



BLUE GROWTH & FOOD SECURITY WORKSHOP, Jakarta, September 8, 2014. Opening remark by HE Sharif C Soetardjo, Minister of Marine Affairs and Fisheries - Indonesia



Minister Sharif C Soetardjo presented a Book entitled : BLUE ECONOMY to the Dutch Vice Minister, Mr.Hans Hoogeveen



**Minister Sharif C Soetardjo presented a Book entitled :
BLUE ECONOMY to the FAO ADG-FI, Arni Mathiesen**



Minister Sharif C Soetardjo presented a Book entitled : BLUE ECONOMY to the World Bank Representative, Valerie Hickey



Workshop on Blue Growth Initiative, Jakarta September 8, 2014, from left: MOMAF Secretary General, Sjarief Widjaja, Dutch Vice Minister Hans Hoogeveen, MOMAF Minister HE Sharif C Soetardjo, the World Bank Representative, Valerie Hickey, FAO ADG FI, Arni Mathiesen, FAO FIR Director, Indroyono Soesilo.



Press Briefing, from left: Ms.Valerie Hickey of the World Bank, Arni Mathiesen ADG-FI FAO and HE.Sharif C.Soetardjo, Minister of Marine Affairs and Fisheries



Press Breifing following the Workshop Opening Ceremony, Jakarta, September 8 , 2014,. From Left: Dutch Vice Minister Hans Hoogeveen, World Bank Rep., Valerie Hickey, ADG FI FAO Arni Mathiesen, MOMAF Minister, HE Sharif C Soetardjo.



From left: Arni Mathiesen, ADG-FI FAO, Sjarief Wijaya, Secretary General of MOMAF, Indroyono Soesilo, FAO FIR Director



Workshop on the Development of a Global Alliance/Network for Aquaculture and Food Security

September 7-8, 2014

Hotel Indonesia

Jakarta

Support



**Presentation of Global Blue Growth Initiative by FAO
ADG-FI, Arni Mathiesen, Jakarta, September 7, 2014**



MMAF Partners with World Bank and FAO to Initiate the Action Plan of the Global Marine Program

JAKARTA, Sept. 8, 2014 (ANTARA) -- The Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) partners with the World Bank and FAO to discuss the initiation of the Action Plan of the Global Marine Program. Indonesia was the chosen country by those two institutions given it is one of the countries consistently accelerating the development in the marine and fishery sectors as a whole, driven by the long-term strategy, the Blue Growth.

As a brief summary, the world will obviously face one of the big issues in the to fulfill the food necessity for approximately its 9 billion people by 2050. This challenge is ultimately in consequence of the complexity of the climate change impact, the condition of the uncertainty in the economic and finance sectors, and the strict competition in the use of the natural resources. Therefore, to overcome this challenge and to ensure that the world can double its food resilience, MMAF working with the World Bank and FAO believe that we need to respond, by executing integrated transition efforts, to turn the current world's economy into a sustainable, inclusive development and the efficient and effective use of natural resources.

Sharif C. Sutardjo, the Minister of Marine Affairs and Fisheries, explains that the importance of the Blue Economy paradigm in the national marine development is as the reflection of the growth, development, and environment synergy oriented to the triple helix model - a development model unifying the land and marine development by optimizing the use of technology, industry, and the natural resources (both land and marine).

Referring to the World Bank's and FAO's reports, by 2030, it is predicted that nearly two-thirds of the world's overall fishery consumption will be sourced from the fishery sub-sector which mostly relies on the Asia, including South Asia, Southeast Asia, China, and Japan is expected to be the ones obliged to fulfill the 70 percents of the global fishery demand.

The meeting is a follow-up for the Global Oceans Action Summit held in The Hague, the Netherlands, on April 2014. The Summit was held to strengthen the regional and international partnership in the marine and fishery sectors. Collaborating with the World Bank, MMAF develops its best efforts to achieve the sustainable utilization of marine resources. With FAO, MMAF is agreed to identify the marine commodity development to increase the people's livelihood and to help eradicate the poverty.

Furthermore, Sharif added that he will initiate a consultative working group consisting of a number of nations, international organizations, and other international institutions. This group is the implementation of the Voluntary Guidelines on the Blue Growth and the food resilience.

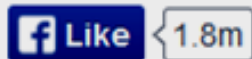
Kebutuhan pangan membengkak, KKP bahas program kelautan global



Merdeka.com - Sebagai negara maritim dan dinilai konsisten mengakselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional dalam program ekonomi biru atau blue growth. Bank Dunia dan Organisasi Pangan dan Pertanian global (FAO) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dalam membahas rencana aksi program kelautan global di Jakarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan **Sharif Cicip Sutardjo** menegaskan dunia menghadapi salah satu tantangan yang berlipat ganda untuk mencukupi kebutuhan pangan 9 miliar manusia pada tahun 2050. Kondisi ini diperparah, dampak dari perubahan iklim, ketidakpastian kondisi ekonomi dan keuangan, dan kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

5 Masukan pengusaha ke
Jokowi soal tol laut



"Ekonomi Kelautan dengan penerapan model ekonomi biru akan disinergikan dengan berbagai kebijakan baik lokal maupun nasional, SDM, teknologi, akses keuangan, industrialisasi (hulu dan hilir), pendidikan, dan kesadaran kolektif masyarakat akan potensi kelautan," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima

merdeka.com, Senin (8/9).

Merujuk pada laporan dari Bank Dunia dan FAO, pada 2030 diperkirakan hampir dua pertiga dari konsumsi hasil perikanan di seluruh dunia akan berasal dari sub sektor perikanan. Kawasan Asia termasuk Asia Selatan, Asia Tenggara, China dan Jepang diproyeksikan akan menebus 70 persen dari permintaan ikan global.

Indonesia memiliki modal dasar potensi pembangunan yang jauh lebih besar dan beragam daripada negara-negara lain. Jika seluruh potensi kelautan ini dikelola dengan baik, diperkirakan 85 persen perekonomian nasional akan ditopang oleh sumber daya kelautan termasuk pangan.

Menteri menegaskan masuknya sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor utama penopang perekonomian Indonesia menjadi keniscayaan, karena luas wilayah Indonesia yang 75 persennya atau 5,8 juta kilometer persegi territorial laut lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah daratan.

"Jika berkaca pada pertumbuhan sektor kelautan pada tahun 2010-2013, sektor ini tumbuh secara signifikan di atas 6 persen. Sementara kontribusi sektor kelautan mampu menyumbang 22 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)," katanya.

Pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut pertemuan Global Oceans Action Summit di The Hague, di Belanda bulan April 2014. Pertemuan ini, upaya memperkuat kerja sama regional maupun internasional di sektor kelautan dan perikanan.

Pertemuan selanjutnya akan berlangsung di Grenada, pada awal tahun 2015. Sedangkan hasil pembahasan dari workshop di Jakarta, akan dibahas lebih lanjut pada ajang pertemuan Climate Summit 2014 yang berlangsung pada bulan September ini di New York, Amerika Serikat.

Bank Dunia – FAO – KKP Bahas Program Kelautan Global

Senin, 8 September 2014 12:00 WIB | 2.275 Views

Jakarta, 8 September 2014 (ANTARA) -- Bank Dunia dan Organisasi Pangan dan Pertanian global (FAO) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dalam membahas rencana aksi program kelautan global. Pasalnya, Indonesia dinilai sebagai negara yang konsisten dalam mengakselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional dengan bernafaskan *Blue Growth*. Permintaan ini merupakan momentum positif dalam mendorong dan mempercepat terlaksananya aksi nyata dan kemitraan di dalam pengembangan *Blue Growth* untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo saat membuka *workshop* Aliansi Global Blue Growth dan Ketahanan Pangan di Jakarta, Senin (08/09).

Sebagai gambaran, saat ini, dunia tengah menghadapi salah satu tantangan Dalam mencukupi kebutuhan pangan 9 miliar manusia pada tahun 2050. Mengingat berbagai kondisi dan dampak dari perubahan iklim, ketidakpastian kondisi ekonomi dan keuangan, dan kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Melihat kondisi tantangan yang berlipat ganda dalam ketahanan pangan, Sharif menilai perlu suatu respon dan upaya transisi yang terintegrasi guna mengubah ekonomi dunia ke arah pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien.

Terkait hal itu, Sharif menjelaskan, hadirnya paradigma Ekonomi Biru™ dalam pembangunan kelautan nasional sebagai refleksi sinergitas pertumbuhan, pembangunan dan lingkungan dengan berpedoman pada *triple helix model*. Ekonomi Kelautan dengan penerapan model Ekonomi Biru akan disinergikan dengan berbagai kebijakan baik lokal maupun nasional, SDM, teknologi, akses keuangan, industrialisasi (hulu dan hilir), pendidikan, dan kesadaran kolektif masyarakat akan potensi kelautan. Paradigma Ekonomi Biru™ yang selalu disuarakan KKP menjadi model pembangunan ekonomi yang menyatukan pembangunan laut dan daratan dengan menekankan pengoptimalan pemanfaatan teknologi, industri, tanah dan perairan laut sehingga berujung pada meningkatnya taraf pemanfaatan sumber daya laut.

Jika merujuk pada laporan dari Bank Dunia dan FAO, pada tahun 2030 diperkirakan hampir dua pertiga dari konsumsi hasil perikanan di seluruh dunia akan berasal dari sub sector perikanan. Sehingga kawasan Asia termasuk Asia Selatan, Asia Tenggara, China dan Jepang diproyeksikan akan menebus 70 persen dari permintaan ikan global. Tak salah jika dikatakan, potensi kelautan dan perikanan telah menjadikan Indonesia memiliki modal dasar potensi pembangunan yang jauh lebih besar dan beragam daripada negara-negara lain. Jika seluruh potensi kelautan ini dikelola dengan baik maka diperkirakan 85 persen perekonomian nasional akan ditopang oleh sumber daya kelautan termasuk pangan. Masuknya sektor kelautan dan perikanan sebagai sector utama penopang perekonomian Indonesia menjadi keniscayaan, karena luas wilayah Indonesia yang 75 persennya (5,8 juta km²) territorial laut lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah daratan. Contohnya, jika berkaca pada pertumbuhan sektor kelautan pada tahun 2010-2013, sektor ini tumbuh secara signifikan di atas 6 persen. Sementara kontribusi sector kelautan mampu menyumbang 22 persen dari Product Domestic Bruto (PDB).

Sebagai informasi, pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut pertemuan the Global Oceans Action Summit di Den Haag, di Belanda bulan April 2014. Sementara dalam pertemuan ini, sebagai upaya memperkuat kerja sama regional maupun internasional di sektor kelautan dan perikanan. Adapun penguatan kerja sama itu yakni, dengan Bank Dunia dalam menyusun

kemitraan global pemanfaatan laut secara lestari dan berkelanjutan. Kemudian dengan KKP dengan FAO sepakat untuk mengidentifikasi pengembangan komoditas laut untuk kehidupan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Seperti diketahui sebelumnya, KKP telah menjalin kerja sama dengan organisasi pangan dunia ini. Kerja sama tersebut dinilai telah mencapai keberhasilan, diantaranya pengembangan kawasan, komoditas, inovasi teknologi dan sumber daya manusia, pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta berbagai program menyangkut kepentingan para nelayan. Selain itu, KKP bersama dengan Pemerintah Belanda juga melakukan perluasan kerja sama bilateral dalam merumuskan peran sektor kelautan di dalam ketahanan pangan global.

Selain itu, lebih lanjut Sharif mengemukakan sebuah kelompok kerja/forum kerja konsultatif akan dibentuk. Kelompok kerja ini akan beranggotakan negara, organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya. Terbentuknya Kelompok kerja tersebut sebagai tindak lanjut dari usulan pedoman sukarela (Voluntary Guidelines) tentang *Blue Growth* dan ketahanan pangan. "Indonesia secara sukarela mengusulkan diri sebagai sekretariat kelompok kerja / forum kerja konsultatif dengan dukungan FAO dan Bank Dunia," jelasnya.

Rencananya, pertemuan selanjutnya akan berlangsung di Grenada pada awal tahun 2015. Sedangkan hasil pembahasan dari workshop ini akan dibahas lebih lanjut pada ajang pertemuan Climate Summit 2014 yang berlangsung pada bulan September ini di New York, Amerika Serikat. Sebagai informasi tambahan, dalam workshop kali ini dihadiri oleh Asisten Direktur Jenderal FAO Bidang Perikanan, Duta Besar Grenada, Dirjen Kementerian Urusan Ekonomi Belanda dan lainnya. Sementara, dalam kesempatan ini, Dirjen P2HP KKP berkesempatan dalam menyampaikan perkembangan implementasi *Blue Economy* di Indonesia.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Lilly Aprilya Pregiwati ,Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi , Kementerian Kelautan dan Perikanan (Telp. 021-3520350)



FRIENDS OF INDONESIA – FAO Informal Dinner, Jakarta, September 7, 2014, from left: David Brown (FAO-GEF Inland Fisheries Project), Devin Bartley (FIRF-FAO), Pamuji Lestari (GIAHS Indonesia Project), Cristina (FIRF-FAO) Arni Mathiesen (ADG FI-FAO), Nani Hendiarti (Indonesia Remote Sensing Expert, FAO-Indonesia Climate Change Project), Elvi Wijayanti (Deputy Director MOMAF), Indroyono Soesilo (Director FIR-FAO), Bambang Setiadi (Indonesian Peatland Expert, Indonesia-FAO Project) I Nomura (JICA Indonesia Program), Budi Iskandar (Director Inland Fisheries Research Center – MOMAF), Shahandra Hanintiyo (International Program-MOMAF)